

Lesson Learned Dalam Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara pada Fase Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok 2018

Dede Saputra¹ Agus Wibowo² Christine S. Marnani³ Pujo Widodo⁴ Herlina Juni Risma Saragih⁵ Kusuma⁶

Faculty of National Security, Disaster Manajemen Study Program Republic of Indonesia
Defense University^{1,2,4,5,6}

³University of Pertamina, Indonesia³

Email: dsdedesaputra@gmail.com¹

Abstract

The meeting of these three plates causes areas in Indonesia to be vulnerable to earthquakes. Earthquake is a natural phenomenon that cannot be predicted when they will occur. The 2018 earthquake caused the North Lombok District Government to immediately make efforts to deal with the disaster. Improvement requires special attention during the emergency and post-disaster response periods, both from the central and regional governments as well as other parties, so that all residents can improve and be able to carry out their activities until they recover. The method used in this research is qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation, and document study. The purpose of this study is to make the earthquake event in North Lombok Regency in 2018 a Lesson Learn for all parties, especially in North Lombok district and in general for all Indonesian people so that a disaster-resilient community is formed that has an awareness of the potential disasters that will be faced to contribute to the condition national security.

Keywords: Earthquake, Lesson Learned, Emergency Response Phase, Effort and Response.

Abstrak

Pertemuan ketiga lempeng ini menyebabkan wilayah di Indonesia rentan terhadap bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi kapan waktu terjadinya. Gempa bumi tahun 2018 mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera melakukan upaya penanganan bencana tersebut. Pembinaan memerlukan perhatian khusus pada masa tanggap darurat dan pasca bencana, baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun pihak lainnya, sehingga seluruh warga dapat berbenah dan mampu menjalankan aktivitas hingga pulih kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen. Tujuan dari penelitian ini menjadikan peristiwa gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2018 sebagai *Lesson Learn* bagi semua pihak khususnya di kabupaten Lombok Utara dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia agar terbentuk masyarakat tangguh bencana yang memiliki kesadaran akan potensi bencana yang akan dihadapi guna berkontribusi pada kondisi keamanan secara nasional.

Kata Kunci: Gempabumi, Lesson Learned, Fase Tanggap Darurat, Upaya dan Respon.



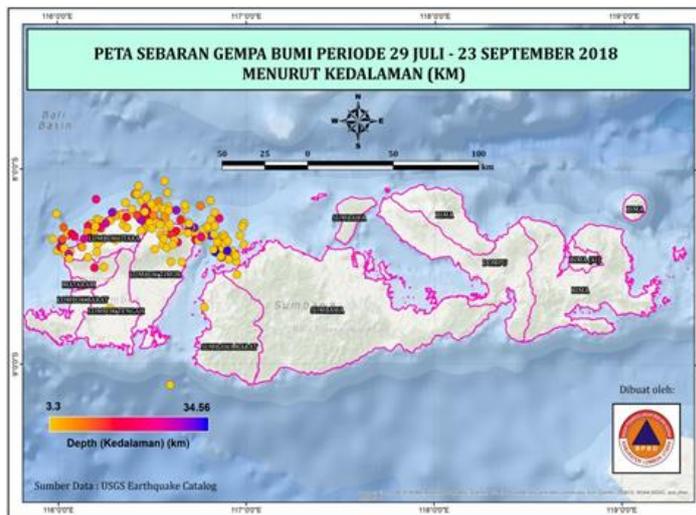
Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Secara tidak langsung, untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan diperlukan keamanan nasional sebagai bentuk terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman (Mukhtar, S., 2017). Bencana alam adalah salah satu ancaman yang ada di Indonesia (Maarif, S., et al., 2012).

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang unik dan memiliki potensi tinggi kerawanan bencana. Indonesia berada diantara tiga pertemuan lempengan yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Eurasia. Pertemuan ketiga lempeng ini menyebabkan wilayah di Indonesia rentan terhadap bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi kapan waktu terjadinya. Fenomena ini dapat sangat berbahaya tergantung pada seberapa kuat dan dekat gempa tersebut dengan permukaan bumi dan dapat menyebabkan tsunami. Salah satu bencana terbesar di Indonesia tahun 2018 adalah gempa bumi Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pulau Lombok mengalami rangkaian gempa dimulai pada tanggal 29 July 2018 (M6.4) sebagai *foreshock*, 5 August 2018 (M7.0) sebagai *mainshock* pertama, 9 Agustus 2018 (M6.2) sebagai *aftershock* signifikan, serta 19 Agustus 2018 yang didahului *foreshock* M6.3 dan *mainshock* kedua M6.9 sepuluh jam setelahnya (Pradono, 2018). Gempa bumi ini mengakibatkan banyak kerusakan dan trauma bagi seluruh warga di Pulau Lombok. Berdasarkan gambar 1. peta sebaran gempa bumi terlihat sumber gempa bumi berada di wilayah bagian utara Pulau Lombok.



Gambar 1. Peta sebaran gempa bumi periode 29 Juli – 23 September 2018

(Sumber: Presentasi BPBD Lombok Utara dalam KKDN Prodi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan)

Gempa bumi Lombok tahun 2018 mengakibatkan 436 orang meninggal dunia diantaranya di Kabupaten Lombok Utara 374 orang, Lombok Barat 37 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Timur 12 orang, Lombok Tengah 2 orang dan Kota Denpasar 2 orang. Korban luka-luka akibat gempa bumi sebanyak 1.353 orang dan 352.793 orang mengungsi. Sebaran pengungsi terdapat di Kabupaten Lombok Utara 137.182 orang, Lombok Barat 118.818 orang, Lombok Timur 78.368 orang dan Kota Mataram 18.368 orang. Secara umum pengungsi yang mengungsi di lapangan atau lahan terbuka mendirikan tenda bantuan dari BNPB, TNI, Polri, Kemensos, Kementerian PUPR, Pemda, NGO dan lainnya (BNPB, 2018). Wilayah Kabupaten yang paling berdampak akibat bencana gempa bumi ini adalah Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah kabupaten terdampak baik korban meninggal, luka-luka maupun mengungsi. Secara wilayah, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB paling banyak adalah di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai lebih dari kerugian yang timbul diperkirakan lebih dari 10,15 triliun rupiah (Pusdatinmas BNPB, 2018). Gempa bumi tahun 2018 mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera melakukan upaya pembenahan. Pembenahan ini memerlukan perhatian khusus pada masa

tanggap darurat dan pasca bencana, baik dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lainnya. Melalui penelitian ini, penulis mengkaji upaya pemerintah maupun pihak lain melalui BPBD Kabupaten Lombok Utara terutama pada masa tanggap darurat sehingga seluruh warga dapat berbenah dan mampu menjalankan aktivitas hingga pulih kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran dan menjadikan peristiwa Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Utara sebagai pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana guna mendukung Keamanan Nasional. Bencana Gempa Bumi yang melanda Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2018 merupakan peristiwa yang bisa dijadikan pembelajaran bagi seluruh masyarakat bagaimana proses dan analisis siklus bencana yang terjadi serta cara penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu terutama bagi mahasiswa prodi manajemen bencana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata tertulis dan lisan dari narasumber (Moleong, L. J., 2010). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik wawancara mendalam untuk memperoleh data primer dari narasumber. Narasumber penelitian berasal dari instansi terkait, yaitu BPBD Kabupaten Lombok Utara, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Korem 162/ Wira Bhakti Mataram. Teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder sehingga mendukung data yang diperoleh dalam teknik wawancara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data berdasarkan Miles and Huberman adalah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing and verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi) (Sugiyono, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gempa pertama terjadi tanggal 29 Juli 2018 pukul 06:47:38 WITA, dengan kekuatan Magnitudo 6.4. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, dan Sumbawa Besar. Gempa ini telah menghancurkan sebagian dari Lombok Utara dan Lombok Timur, khususnya di daerah sekitar lereng Gunung Rinjani. Selanjutnya Gempa Bumi kedua terjadi pada tanggal 05 Agustus 2018 pukul 19:46:35 WITA dengan kekuatan Magnitudo 7,0 dan dirasakan di hampir seluruh Pulau Lombok. Pasca Gempa kedua, Gempa susulan terus berulang dan meluluh lantahkan berbagai fasilitas umum dan rumah penduduk serta menimbulkan kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penanganan bencana, di luar Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2018, Pemerintah Nusa Tenggara Barat pun sigap dan cepat merespon harapan masyarakat dengan diterbitkannya:

- Keputusan Gubernur NTB No. 360-612 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat;
- Keputusan Gubernur NTB No. 360-789 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Transisi Darurat ke Pemulihan dan Percepatan Rehab Rekon Pasca Gempa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Keputusan Gubernur NTB No. 360-103 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Transisi Darurat ke Pemulihan dan Percepatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Gempa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Upaya BPBD Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan hasil wawancara dan pendalaman secara langsung kepada Analis Kebencanaan BPBD Kabupaten Lombok Utara selaku narasumber melalui media *zoom meeting* bahwa pembelajaran yang didapatkan (*lesson learned*) dalam upaya penanggulangan bencana di fase tanggap darurat dibagikan dalam bentuk pengalaman teknis dan kebermanfaatannya kepada masyarakat terdampak yakni (1) melakukan kaji cepat; (2) membuka posko darurat; (3) memberikan bantuan primer yang selanjutnya (4) pemenuhan kebutuhan dasar serta (5) perbaikan perumahan dan prasarana vital lainnya.

Dari setiap upaya yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terdapat beberapa cerita yang disampaikan langsung oleh masyarakat sehingga menjadi suatu pengalaman dan pembelajaran dalam penanganan tanggap darurat bencana diantaranya:

- Masyarakat terdampak menolak rumah dari beton, dikarenakan trauma dari gempa besar yang pernah terjadi;
- Wilayah bagian utara memiliki potensi ancaman lebih tinggi. Parameter yang digunakan antara lain: jarak dari generator gempa (berdasarkan historis seismisitas), jenis batuan, nilai PGA, nilai AVS-30, dan sebagainya;
- Sebagian rumah masyarakat sudah mengalami keretakan, jadi jika terjadi guncangan susulan masyarakat sudah mengamankan diri;
- Banyaknya relawan yang turun dan ikut serta membantu dalam upaya percepatan penanganan bencana;
- Hampir semua wisatawan mengamankan diri ke Lombok daratan. Kejadian ini dibantu TNI dan Basarnas untuk membantu menyebrangkan masyarakat ke Lombok daratan;
- Penyebaran logistik banyak diberikan di akses utama, sehingga bagian dalam wilayah menjadi tidak tersentuh dan bahkan tidak mendapatkan bantuan.

Kegiatan yang dilakukan pada fase tanggap darurat bencana pada dasarnya mengacu atas manajemen tanggap darurat yang pertama dilakukan yaitu membentuk Pos Komando Darurat yang berada di Tanjung. Kemudian melakukan pembagian tugas para pihak (per klaster) menurut kewenangan masing - masing, semua bantuan eksternal (idealnya) dikelola melalui Posko Darurat. Pada proses awal, mendahulukan kebutuhan yang bersifat mendesak (seperti bahan makanan, material hunian sementara di pengungsian). Proses lain yang tidak kalah penting yaitu pendataan korban maupun kerusakan yang diakibatkan bencana dipimpin oleh Bappeda dengan melibatkan pihak-pihak terkait (mahasiswa, relawan dan sebagainya). Adapun masalah yang timbul pada saat masa darurat, seperti: Banyak bantuan *missed* dari control pos komando karena beberapa pihak langsung memilih lokasi dropping bantuannya sehingga bantuan tidak terdistribusi merata; Sebagian besar pegawai Pemerintah daerah Lombok Utara adalah penyintas sehingga butuh waktu untuk memaksimalkan keterlibatan personilnya; dan minimnya sarana sanitasi sehingga menyebabkan penularan penyakit di banyak posko pengungsian.

Terdapat 5 (lima) fokus kerja BPBD Kabupaten Lombok Utara dalam masa tanggap darurat bencana yaitu: (1) Mengkoordinasikan upaya pencarian dan pertolongan masyarakat; (2) Mengkoordinir pendistribusian logistik dan pengaturan bantuan pihak luar; (3) Mengkoordinasikan pendataan dampak bencana dengan para pihak terkait; (4) Memberikan support kepada relawan yang melakukan penanganan darurat di Lombok Utara. Sedangkan dalam masa transisi darurat ke pemulihan (5) Mendorong percepatan pendataan dampak bencana pada sektor pemukiman dengan membangun koordinasi dengan pemangku kewilayahan juga meminta pendampingan dalam hal pendanaan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan data yang dirilis oleh BNPB penggunaan dan

penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara sebesar 241 milyar rupiah untuk pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di wilayah tersebut.

Upaya Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim)

Berdasarkan hasil wawancara dan pendalaman secara langsung kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Nusa Tenggara Barat selaku narasumber melalui media *zoom meeting* bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki peran penting dalam penanganan pembangunan kembali pasca bencana gempa bumi NTB 2018. Berikut ini adalah beberapa peran penting Dinas Perumahan dan Permukiman dalam penanganan pembangunan kembali pasca bencana gempa bumi NTB 2018 yaitu:

1. Identifikasi kerusakan: Dinas Perumahan dan Permukiman harus melakukan identifikasi terhadap kerusakan bangunan dan permukiman yang terjadi setelah gempa bumi. Hal ini dilakukan agar dapat menentukan prioritas dalam memulihkan kondisi bangunan dan permukiman yang rusak;
2. Pemetaan lokasi: Dinas Perumahan dan Permukiman harus melakukan pemetaan lokasi bangunan yang rusak dan melakukan tata ruang ulang untuk memastikan bahwa bangunan yang dibangun kembali sesuai dengan tata ruang yang aman;
3. Koordinasi dengan instansi terkait: Dinas Perumahan dan Permukiman perlu untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, karena memainkan peran penting dalam melakukan identifikasi kerusakan di sekitar daerah yang terkena dampak gempa bumi. Melalui pemetaan lokasi kerusakan, Disperkim dapat menentukan prioritas bangunan mana yang harus dipulihkan terlebih dahulu. Dalam hal ini, Disperkim berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BNPB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk memberikan bantuan yang optimal kepada masyarakat yang terkena bencana gempa bumi;
4. Penyediaan material bangunan dan peralatan masyarakat: Dinas Perumahan dan Permukiman harus memastikan ketersediaan material bangunan dan peralatan untuk membangun kembali permukiman dan bangunan yang rusak akibat bencana gempa bumi. Selain itu, juga harus memberi pelatihan kepada masyarakat dalam hal pembangunan agar masyarakat dapat membantu dalam pembangunan kembali pasca bencana gempa bumi;
5. Pengawasan pelaksanaan pembangunan: Dinas Perumahan dan Permukiman harus melakukan pengawasan terhadap pembangunan kembali pasca bencana gempa bumi. Hal ini bertujuan agar pembangunan berjalan dengan baik dan benar sehingga bangunan yang dibangun kembali dapat memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan.

Selain melakukan upaya dalam penanganan pembangunan kembali pasca bencana gempa bumi, Disperkim juga memiliki peran penting dalam membangun rumah tahan gempa. Disperkim mengembangkan standar bangunan tahan gempa yang ketat dan memberikan pelatihan kepada kontraktor dan pekerja bangunan. Selain itu, Disperkim juga melakukan pengawasan selama pelaksanaan pembangunan rumah tahan gempa dan memberikan sumber daya yang dibutuhkan, seperti material bangunan yang kuat dan aman, dibuktikan dari Jumlah RTG yang dibangun berdasarkan sumber Disperkim. Pembangunan huntap (hunian tetap) dengan beberapa konsep seperti Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), Rumah Instan Konvensional (RIKO) dan Rumah Instan Struktur Baja (RISBA), dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dibangun pada fase tanggap darurat bencana.

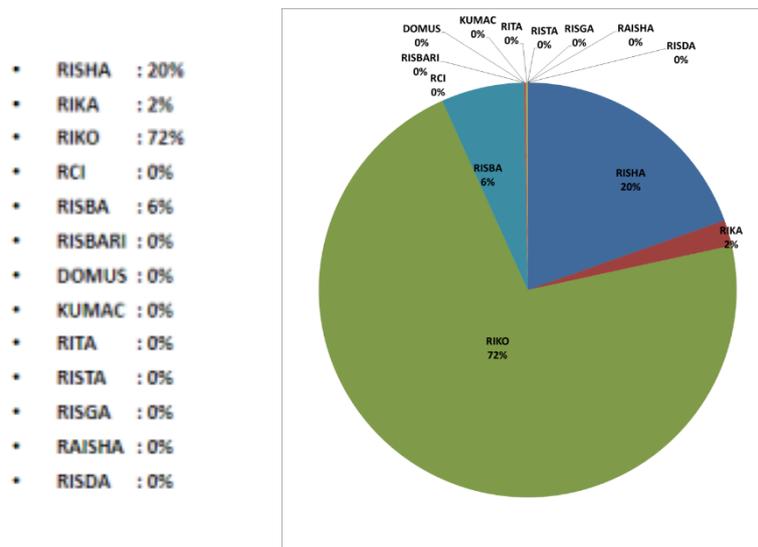
Tabel 1. Progres Pelaksanaan Pembangunan RTG di NTB

NO	KOTA/KABUPATEN	JUMLAH KERUSAKAN	WILAYAH TERDAMPAK	
		SK PENETAPAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	MATARAM	15,479	6	50
2	LOMBOK BARAT	75,184	10	121
3	LOMBOK TENGAH	26,370	12	117
4	LOMBOK UTARA	62,014	6	33
5	LOMBOK TIMUR	29,922	20	168
6	SUMBAWA BARAT	18,332	8	65
7	SUMBAWA	15,479	15	62
TOTAL JUMLAH		242,780	77	616

Jumlah Rumah yang diperbaiki sebanyak 221.062 unit dengan rincian:

- Tahap I sejumlah 211.820 unit
 - Tahap II sejumlah 9.242 unit
- Anggaran mencapai Rp 6.3 Trilyun

Berdasarkan tabel diatas, upaya pembangunan rumah tahan gempa ini merupakan salah satu upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh Disperkim Provinsi NTB. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan korban jiwa akibat gempa bumi pada masa yang akan datang.



Gambar 2. Presentasi Pembanguna RTG Pasca Gempa NTB 2018

Dalam pengembangan program rumah tahan gempa, Disperkim Provinsi NTB melakukan beberapa langkah dalam membangun rumah tahan gempa. Berikut ini adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dalam membangun rumah tahan gempa yaitu:

- Mengembangkan Standar Bangunan: Bertanggung jawab untuk mengembangkan standar bangunan yang tahan gempa. Standar ini harus memenuhi persyaratan keamanan yang ketat agar bangunan tahan gempa.
- Memberikan Pelatihan: Pelatihan ini meliputi teknik bangunan tahan gempa dan penggunaan bahan bangunan yang kuat dan aman.
- Membimbing dan Melakukan Pengawasan: Bertanggung jawab untuk membimbing dan melakukan pengawasan selama pelaksanaan pembangunan rumah tahan gempa.

Pengawasan yang dilakukan termasuk inspeksi bangunan dan penilaian kelayakan bangunan untuk dipenuhi standar keamanan.

- Penyediaan Sumber Daya: Menyediakan sumber daya untuk membangun rumah tahan gempa, seperti material bangunan yang tahan gempa dan terbaru. Selain itu, menawarkan aksesibilitas yang mudah ke bahan-bahan ini serta penyebaran informasi.
- Pengawasan Pemeliharaan: Peran Disperkim tidak berakhir saat rumah telah selesai dibangun juga terus melakukan pengawasan dan pemeliharaan pada rumah tahan gempa setelah rumah dibangun agar bangunan tetap aman dan terhindar dari kerusakan.

Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai upaya dalam membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana gempa bumi di masa yang akan datang. Dengan adanya program pembangunan rumah tahan gempa, diharapkan jumlah korban jiwa dan kerusakan akibat bencana gempa bumi dapat diminimalisir.

Upaya Korem 162/ Wira Bhakti Mataram

Peran besar berikutnya yaitu dari TNI. Pada saat terjadi bencana gempa bumi NTB, Komando Resort Militer (Korem) 162/Wira Bhakti bertugas menjadi komandan tim pos komando (Dantim Posko) tanggap darurat bencana alam Gempa Bumi di Pulau Lombok NTB melalui SK Gubernur NTB Nomor 360-611 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018. Pada fase tanggap darurat, TNI menjadi garda terdepan dalam memberikan pertolongan pertama dan penyelamatan korban (Hediarto dkk., 2016). Selain menyelamatkan korban gempa, TNI juga berperan besar pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. TNI telah membangun sebanyak 226.303 unit RTG diperuntukkan bagi tempat tinggal masyarakat yang terdampak gempa dan membantu pemulihan perekonomian masyarakat. Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, TNI menjadi garda terdepan dalam membantu warga memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal yang serupa juga dilakukan oleh TNI dalam penanggulangan bencana di Provinsi Lampung. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat hingga pascabencana (Widyaningrum dkk., 2020).

Pemerintah Daerah melalui Gubernur NTB mengeluarkan pernyataan tanggap darurat dan berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 360-642 tahun 2018 tentang pembentukan tim pos komando tanggap darurat bencana alam gempa bumi di Pulau Lombok Provinsi NTB menjuk Danrem 162/Wira Bhakti sebagai Dansatgas Penanggulangan Bencana Gempa Lombok. Selanjutnya adalah dengan membentuk Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Lombok yang melibatkan semua unsur baik dari Pemerintah Daerah, TNI, Polri maupun lembaga terkait untuk mempermudah koordinasi dan pengerahan segala sumber daya yang tersedia dalam rangka penanganan darurat bencana.



Gambar 2. Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Lombok 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan pendalaman secara langsung kepada Komandan Korem 162/ Wira Bhakti Mataram selaku narasumber melalui media *zoom meeting* bahwa peran Korem 162/Wira Bhakti yang telah dilakukan pada masa tanggap darurat bencana yaitu : (1) Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang peringatan dini terjadinya bencana alam. Khususnya bencana gempa bumi; (2) Memantau perkembangan bencana alam melalui instansi resmi dan dapat dipercaya (BMKG) dan membantu menyebarluaskan kepada masyarakat; (3) Ikut serta dalam kegiatan SAR, meliputi pencarian korban, evakuasi dan pemakaman korban yang meninggal dunia; (4) Membantu mendirikan fasilitas pengungsian dengan menyiapkan tempat tinggal sementara, fasilitas sanitasi dan air bersih serta dapur umum; (5) Mendirikan fasilitas pengobatan darurat lapangan untuk mengobati korban luka. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober s.d. 26 Februari 2020 dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Adapun peran Korem 162/Wira Bhati pada tahap ini diantaranya sebagai berikut: (1) Ikut berperan aktif dalam mendirikan atau memperbaiki bangunan dan infrastruktur yang rusak, bersifat mendesak untuk segera diperbaiki. Seperti tempat ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, dll; (2) Memberikan trauma healing kepada masyarakat yang terdampak gempa guna menimbulkan aspek kejiwaan dan psikologis korban; (3) Ikut membantu masyarakat dalam mendirikan hunian tinggal yang aman dan tahan gempa seperti RISHA, RISBA dan sebagainya.

Kendala utama yang dihadapi saat penanggulangan bencana adalah terbatasnya sarana komunikasi karena hancurnya infrastruktur yang ada. Dalam waktu beberapa hari setelah kejadian, segala bentuk komunikasi harus dilakukan secara manual karena jaringan seluler yang terputus. Untuk mengatasi hal ini, Komandan Korem 162/Wira Bhakti selaku Dansatgas banyak menginstruksikan untuk melaksanakan rapat dan *standby* di Pos Komando kepada para unsur-unsur pimpinan atau perwakilan yang terlibat dalam penanggulangan bencana agar proses komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya adalah dengan berkoordinasi dan meminta bantuan kepada operator seluler terkait untuk segera membangun tower darurat agar komunikasi segera dapat digunakan. Permasalahan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menjamin pendistribusian bantuan agar dapat merata ke seluruh wilayah yang terdampak. Karena banyaknya kendaraan milik TNI, Polri maupun pemerintah daerah yang rusak akibat bencana gempa bumi. Untuk mengatasi hal ini, anggota Korem dibantu oleh Polri dan instansi lain melaksanakan *sweeping* dan inventarisir kendaraan yang masih tersedia dan dapat digunakan di seluruh wilayah NTB. Baik milik pemerintah daerah maupun swasta. Sehingga seluruh kendaraan tersebut dapat digunakan oleh Satgas untuk kepentingan penanggulangan bencana. Baik untuk pendistribusian bantuan, evakuasi korban maupun relokasi pengungsi.

Korem 162/Wira Bhakti dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana menggunakan prosedur pelaksanaan tugas pada tahap sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana sesuai dengan Peraturan Kasad (Perkasad) Tahap sebelum bencana, menyiapkan satuan PRC PB (Tim Kes, Zeni, Pembekalan, Angkutan, Perhubungan dan tim evakuasi), mensosialisasikan Protap satuan kepada unsur bawahan (Kodim dan Koramil), memberdayakan potensi Linmas dan berkoordinasi dengan pemerintah, menentukan dan merencanakan kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan bencana antara Kodim dan pemerintah daerah melalui kegiatan pembinaan teritorial (Binter), mendata dan menetapkan daerah rawan bencana (gempa bumi, longsor, banjir, dan sebagainya).

KESIMPULAN

Pelajaran yang didapatkan (*Lesson learn*) dalam peristiwa bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Lombok Utara tahun 2018 diantaranya

adalah: (a). Memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait hasil kaji cepat; (b). Manajemen evakuasi bencana harus lebih cepat dan sistematis; (c) Menyediakan tenda pengungsian yang lebih nyaman dan menarik untuk ditinggali oleh korban bencana gempa; (d) Pemahaman tentang adanya kearifan lokal disuatu daerah yang dapat membantu dalam hal kecepatan dan ketepatan penanggulangan bencana.

Dalam peristiwa bencana selalu ada pembelajaran yang dapat dipetik untuk perbaikan sistem dan pengelolaan terhadap apa yang akan dihadapi dimasa depan. Respon cepat, kaji cepat dan koordinasi yang baik harus segera dilakukan karena akan memunculkan rencana pada fase transisi darurat ke pemulihan. Proses respon yang cepat dan tepat menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan peristiwa bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Lombok Utara. Koordinasi yang matang dan kesiapsiagaan yang baik akan membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana dan pada akhirnya akan berkontribusi pada kondisi Keamanan Nasional yang stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018). Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Hediarto, Ito., Armawi, Armaidly., Martono, Edhi, 2016, "Optimalisasi Peran Kodim Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kodim 0613/Ciamis, Jawa Barat)", Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 22 No. 3, hh. 321-333.
- Maarif, S. (2012) Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia, Bimtek Manajemen Penyusunan Peta Rawan Bencana.
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, S. (2017). Keamana Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia1. *Sociae Polites*. Hal 127-137.
- Pradono, M. H. (2018). Kajian Kerentanan Bangunan Pasca Gempa Lombok 5 Agustus 2018. *Jurnal Alami: Jurnal Teknologi Reduksi Risiko Bencana*, 2(2), 82-88.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widyaningrum, N., Kodar, M. S., Purwanto, R. S., Priambodo, A., & Fadlurrahman, I. (2020). Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung). *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 5(1), 40-48.